KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rumah jabatan DPR yang melompong
Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Rumah Jabatan DPR yang Melompong

Deretan rumah tak berpenghuni di kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR di kawasan Jaksel menyajikan ironi di tengah pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Apalagi, kebutuhan masyarakat akan hunian belum sepenuhnya terpenuhi.

Besarnya nilai tunjangan perumahan bagi anggota DPR tak hanya mengusik publik. Tunjangan yang sempat disebutkan Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota DPR itu juga terasa menjadi ironi di tengah deretan rumah berlantai dua di kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025), yang tampak melompong karena tak berpenghuni.

Kompleks perumahan yang tak lagi dihuni anggota DPR sejak akhir 2024 itu pun tampak tak terawat. Tak terkecuali deretan unit-unit rumah berlantai dua di dalamnya. Rumput liar tumbuh menjulang tinggi hingga menyentuh jendela rumah. Daun kering dibiarkan berserakan di halaman. Cat krem pada dinding dan atap rumah berwarna merah kecoklatan juga terlihat mengusam dan memudar.

Sepi. Tak lagi terlihat kesibukan lalu lalang kendaraan bermotor, juga hilir mudik manusia. Satu-satunya yang "menghidupi" kawasan semata dari Masjid Al-Amin di tengah kompleks. Saat tiba waktu menunaikan shalat, masih ada warga sekitar kompleks yang memilih beribadah di sana.

Di kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata ini, menurut catatan *Kompas*, berdiri 596 rumah. Rumah jabatan untuk anggota DPR juga tersedia di Ulujami, Jaksel, sebanyak 51 rumah.

Menurut salah seorang petugas kebersihan Masjid Al-Amin, rumah-rumah di kompleks itu sudah kosong ditinggal penghuni sejak Desember 2024. Kini, menurut dia, aktivitas rutin di kompleks hanya patroli bergiliran sejumlah petugas keamanan kompleks.

Pedagang minuman yang biasa berjualan di sekitar kompleks, Wardani, menambahkan, pasokan air dan listrik di rumah-rumah juga sudah diputus. Karena itu, ketika malam tiba, hanya sinar dari lampu-lampu penerang jalan yang menyinari kompleks. Tak ada lagi penerangan dari ratusan rumah di dalam perumahan.

"Dulu ramai, di dalam (perumahan), mulai sepi Desember kemarin. Sekarang mungkin di bawah 10 petugas keamanan yang masih ada di dalam. Kan, ada lebih dari 300 rumah di situ," katanya.

Dinilai tak layak

Di pengujung masa jabatan anggota DPR periode 2019-2024, DPR bersama pemerintah memutuskan agar rumah-rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami itu tak lagi perlu ditinggali. Sebagai gantinya, tunjangan perumahan diberikan untuk setiap anggota DPR.

Kondisi rumah yang dinilai tak lagi layak ditinggali wakil rakyat jadi salah satu dasar penggantian. Pertimbangan lain, besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasinya. Dengan memberikan tunjangan perumahan, mereka beranggapan bakal lebih efisien.

Namun, kala itu, besaran tunjangan perumahan itu belum ditentukan. Ketika sudah diputuskan pun, tidak ada penjelasan kepada publik.

Belakangan, saat nominal tunjangan perumahan terungkap ke publik, yakni Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR, publik terkesiap. Nilai tunjangan dinilai terlalu fantastis di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kekecewaan publik pun pecah dalam unjuk rasa menolak tunjangan perumahan anggota DPR yang berlangsung Senin (25/8/2025), di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sehari setelah unjuk rasa, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi soal nilai tunjangan yang diterima anggota DPR.

Menurut Dasco, tunjangan hanya diberikan selama setahun, Oktober 2024-Oktober 2025, dengan besaran Rp 50 juta per bulan, dan uang itu digunakan untuk biaya menyewa rumah selama lima tahun masa jabatan anggota DPR 2024-2029. Maka, total tunjangan perumahan yang akan diterima setiap anggota DPR sebesar Rp 600 juta. Dengan jumlah anggota DPR 2024-2029 sebanyak 580 orang, berarti anggaran yang bakal dikucurkan sebesar Rp 348 miliar.

Intinya, tunjangan perumahan tetap diberikan meski besarannya tidak seperti yang pernah diutarakan pimpinan DPR lainnya ataupun pihak Sekretariat Jenderal DPR, yakni diberikan setiap bulan hingga akhir masa jabatan anggota DPR 2024-2029.

Lantas, bagaimana nasib rumah jabatan DPR?

Kompas telah coba menghubungi Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar untuk menanyakan nasib dari ratusan rumah yang berlokasi di kawasan strategis di Jakarta tersebut. Namun, hingga artikel ini ditulis, Indra tidak merespons.

Pada 7 Oktober 2024, Indra menyatakan bahwa ratusan rumah anggota DPR di Kalibata itu akan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan untuk ditangani lebih lanjut, termasuk perawatan dan pemanfaatannya. Adapun sebagian rumah dinas anggota Dewan yang berada di Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel, akan dijadikan tempat pelatihan bagi aparatur sipil negara.

Tak digunakannya ratusan rumah jabatan anggota DPR itu terbilang ironis di tengah masih banyaknya warga yang kesulitan untuk memiliki rumah. Mengacu data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tercatat kekurangan (*backlog*) rumah mencapai 9,9 juta unit, ditambah lagi masih banyak rumah tidak layak huni, yakni 26,9 juta unit.

Tak selaras efisiensi

Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi pun mengkritik tunjangan perumahan untuk anggota Dewan itu.

Meskipun pimpinan DPR mengklaim tunjangan Rp 50 juta per bulan hanya diberikan sampai Oktober 2025 dan dipakai untuk menutup kebutuhan sewa rumah selama lima tahun, dana yang dibutuhkan tetap saja besar. Bahkan, setelah dihitung, jauh lebih efisien jika rumah-rumah jabatan anggota DPR direnovasi dan mereka tempati.

Berdasarkan kajiannya, biaya perawatan rumah jabatan anggota di Kalibata hanya sekitar Rp 24 juta per unit per tahun. Jika rumah jabatan anggota berjumlah 580 unit, hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 13,9 miliar per tahun. Adapun untuk perawatan selama lima tahun, anggarannya sekitar Rp 69,6 miliar. Dengan nominal tersebut, jelas jauh lebih efisien ketimbang total anggaran tunjangan perumahan untuk 580 anggota DPR sebesar Rp 348 miliar.

"Ini menunjukkan ketidakseimbangan yang sangat tajam dan mengindikasikan kebijakan yang tidak efisien, apalagi jika mengatasnamakan efisiensi," kata Badiul Hadi.

Kebijakan pemberian tunjangan perumahan itu jelas bertentangan dengan kebijakan efisiensi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi di tengah kondisi fiskal yang ketat dan kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendesak, seperti percepatan pembangunan 3 juta rumah layak huni, subsidi pangan, dan penanganan *stunting* atau tengkes.

"Alokasi ini berlebihan, tidak proporsional, dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi yang selama ini digaungkan pemerintah," katanya.

Hal itu juga memunculkan paradoks kebijakan publik. Di satu sisi, DPR mengklaim efisiensi dengan memberikan tunjangan rumah, tapi di sisi lain aset negara berupa rumah jabatan anggota DPR justru terbengkalai dan tidak digunakan.

"Padahal, rumah-rumah ini aset negara yang dibangun oleh APBN untuk kepentingan publik yang kini dibiarkan kosong, mengubah fungsi tanpa memanfaatkan aset tersebut secara optimal. Paradoksnya, di saat rakyat kesulitan akses hunian, aset negara ini justru mubazir," kata Badiul.

Pada akhirnya, pemberian tunjangan perumahan dengan dalih efisiensi justru menunjukkan paradoks kebijakan yang jauh dari rasa keadilan. Rumah jabatan anggota DPR dibiarkan kosong, sedangkan uang rakyat digelontorkan demi kenyamanan elite.

Saat kepercayaan publik terus diuji, akankah akal sehat kembali dipanggil untuk memimpin? (HIDAYAT SALAM)